

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI NOMOR PER-17/MEN/VIII/2005**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai untuk salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Strata (S1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun Oleh :

**ANDRE SEPTIAN**  
**05.20.0016**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2012**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI NOMOR PER-17/MEN/VIII/2005**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai untuk salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Strata (S1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh :

**ANDRE SEPTIAN  
05.20.0016**

Semarang, 25 Juni 2012

Disetujui oleh  
Dosen Pembimbing Skripsi

**(Prof. DR. A. Widanti S.,S.H.,C.N.)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2012**

**PENGESAHAN**



## ABSTRAK

Dalam penetapan upah minimum bagi pekerja/buruh seringkali terjadi ketidaksepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hal tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terdapat perbedaan antara perhitungan dari pemerintah, pengusaha maupun pekerja/buruh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/2005 ? dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengambilan kebijakan untuk menentukan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/ 2005 ?

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu deskriptif untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/2005. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data lapangan berkaitan dengan asas-asas hukum, teori hukum serta peraturan hukum dalam dua tahap penganalisaan, yaitu tahap penggambaran (deskriptif) dan tahap penganalisaan (kritis). Setelah data-data yang ada dianalisa selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan skripsi yang disusun secara induksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan upah minimum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/2005, namun besaran upah minimum di 35 Kabupaten/Kota hanya 8 Kabupaten/Kota saja yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu Kota Semarang sebesar Rp 991.500, Kota Salatiga sebesar Rp 901.396, Kabupaten Boyolali sebesar Rp 836.000, Kota Surakarta sebesar Rp 864.450, Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 843.000, Kabupaten Klaten sebesar Rp 812.000, Kabupaten Temanggung sebesar Rp 866.000, Kota Pekalongan sebesar Rp 895.500. Hambatan yang dihadapi dalam pengambilan kebijakan untuk menentukan upah minimum, yaitu adanya penolakan dari serikat buruh, adanya Perbedaan persepsi terhadap penetapan komponen dalam penghitungan KHL, adanya perbedaan hasil survey terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kata Kunci : *Kebijakan, Provinsi Jawa tengah, Upah Minimum, Permenakertrans*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

- **Ada dua bekal yang harus dimiliki manusia dalam kehidupan ini, yaitu ILMU dan AMAL**



**Kudedikasikan karya ini untuk :**

- ◆ Kedua Orangtuaku
- ◆ Orang-orang dekatku
- ◆ Sahabat-sahabatku
- ◆ Almamater tercinta FH UNIKA

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, penulis sembahkan kepada Yang Maha Kuasa karena atas KehendakNya, sehingga skripsi yang berjudul : “KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER-17/MEN/VIII/2005” dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini menguraikan tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan upah minimum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/2005

Penyusunan skripsi ini secara umum untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara :

1. Prof. DR. Ir. Y. Budi Widianarko, Mec., selaku rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. B. Resti Nurhayati, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Prof. DR. A. Widanti S., S.H.,C.N., selaku Dosen Pembimbing, atas kesabaran, pengarahan, bimbingan serta nasehatnya, sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik
4. Yuni Kusniati, S.H.,M.Hum, selaku dosen wali yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan selama perkuliahan.
5. Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang berkenan memberikan izin dan pengarahan dalam rangka memperoleh data guna penyusunan skripsi ini
7. Umi Hani, Kasi Pengupahan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, yang telah berkenan membantu dalam memberikan data dan informasinya guna penyusunan skripsi ini.
8. Heru Budi Utoyo, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang, yang telah berkenan membantu dalam memberikan data dan informasinya guna penyusunan skripsi ini.
9. Dosen serta staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang khususnya bagian Hukum Perburuhan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
10. Orangtuaku tercinta

11. Mas Brojol yang dengan setia dan penuh kesabaran selalu mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

12. Para pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan skripsi ini, oleh karena itu segal kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2012  
Penulis,

Andre Septian



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Metode Pendekatan .....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Sumber Data .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Teknik Penyajian Data.....	11

6. Teknik Analisis Data .....	13
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Ketenagakerjaan .....	20
1. Pengertian Kebijakan .....	20
2. Pengertian Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja dan Pekerja .....	22
3. Kebijakan Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan .....	25
B. Tinjauan Tentang Upah .....	29
1. Pengertian Upah .....	29
2. Kebijakan Pengupahan Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 .....	32
3. Komponen Penentu Upah Minimum .....	36
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Menentukan Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/2005 .....	42
B. Hambatan yang Dihadapi dalam Pengambilan Kebijakan Untuk Menentukan Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja	

dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/ 2005 .....	74
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

